



GERBANG BARU
NUSANTARA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

2025

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2025, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Surabaya, Januari 2026



Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur,

Dr. Iwan, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770216 199603 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. ISU STRATEGIS	5
D. CASCADING KINERJA	7
E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI	10
1. Urusan Bidang Perindustrian	10
2. Urusan Bidang Perdagangan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RINGKASAN RENSTRA PERIODE BERJALAN)	12
B. RINGKASAN RENJA PERIODE BERJALAN	14
C. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	17
Analisa Capaian Kinerja 2025	17
1. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	18
2. SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	27
3. SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	35
B. REALISASI ANGGARAN	40
1. Sumber Pendanaan APBN	40
2. Sumber Pendanaan non-APBN	41
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	43
1. Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44
2. Inovasi	44
3. Penghargaan	44
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	49
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Murni)	49

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan	51
III. Cascading Kinerja.....	53
IV. Pohon Kinerja.....	54

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 2.2 Ringkasan Renja tahun 2025.....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan	16
Tabel 3.1Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2025.....	17
Tabel 3.1.1 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022-2025	18
Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target tahun 2024	18
Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	19
Tabel 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	20
Tabel 3.1.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan	21
Tabel 3.1.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	21
Tabel 3.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel 3.1.8 Pengukuran Efisiensi Rincian Output (RO) di Tingkat Sasaran.....	22
Tabel 3.1.9 Data Perkembangan Industri di Jawa Timur	25
Tabel 3.1.10 Capaian Target Tahapan Penyelesaian RPIP 2025	25
Tabel 3.1.11 Fasilitasi Standardisasi Produk Industri di Jawa Timur th. 2021-2025	25
Tabel 3.1.12 Capaian Kinerja Pelayanan UPT Industri	26
Tabel 3.2.1 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022-2025	27
Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2025	27
Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	29
Tabel 3.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	29
Tabel 3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	30
Tabel 3.2.6 Alokasi per Sasaran Pembangunan	32
Tabel 3.2.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	32
Tabel 3.2.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 3.3.1 Sasaran Starategis 3	35
Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target tahun 2025	35
Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya	36
Tabel 3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	37
Tabel 3.3.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan	37
Tabel 3.3.6 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	38
Tabel 3.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	40
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025.....	42

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	1
Gambar 1.2 Cascading Kinerja Tahun 2025	10

Ringkasan Eksekutif

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur adalah meningkatkan daya saing industri manufaktur dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Struktur perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada tahun 2025 kedua sektor tersebut berkontribusi sebesar 49,76%. Artinya bahwa sektor industri dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian Jawa Timur.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

TUJUAN 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri mendapat predikat pada Kategori **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) indikator tujuan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yang menghasilkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori sangat baik.

(Supporting) : Mendukung dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui 1 (satu) Sasaran Strategis yang menghasilkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori **Sangat baik**.

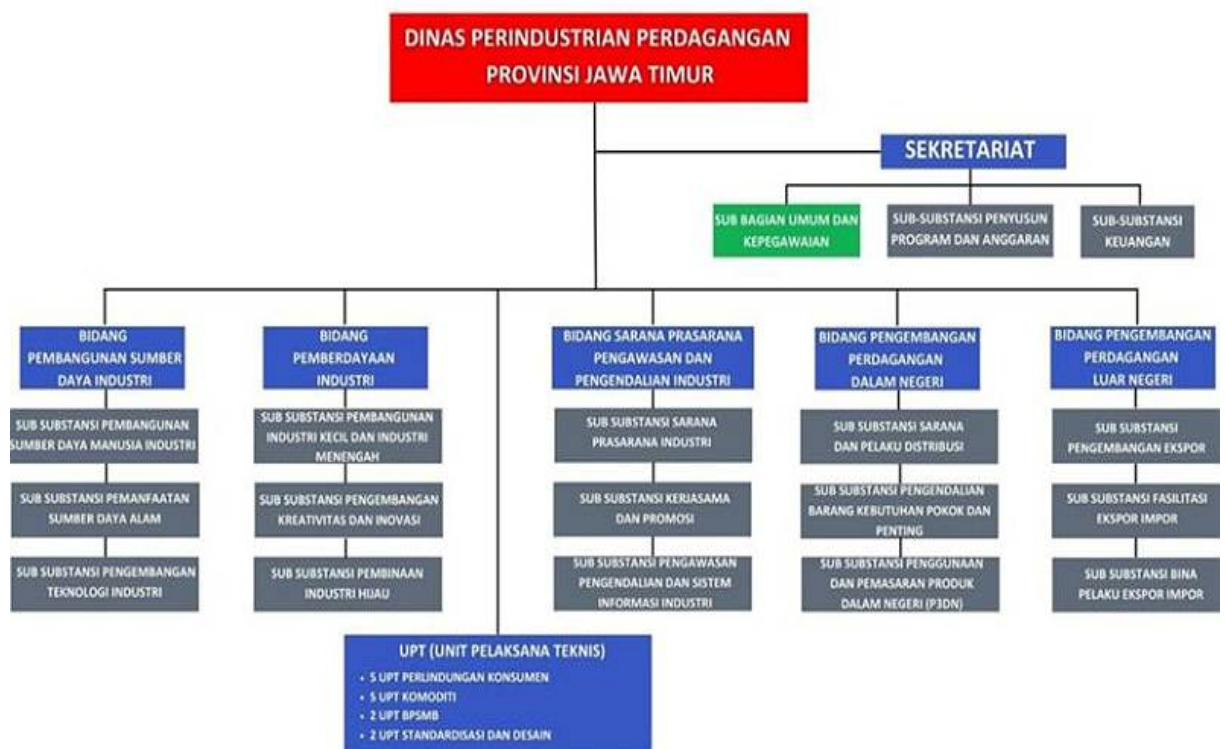
BAB I PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2016, pada Bab IV, pasal 4 bahwa “Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang”. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 tahun 2021, Keputusan Gubernur No. 188-38-KPTS-013-2022, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 tahun 2018, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 unit eselon II, 20 unit eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang, 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pergub 98 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tugas :

Sesuai PERGUB Provinsi Jawa Timur No. 98 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, dalam Bab III Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 4, bagian ayat (1) disebutkan bahwa “***Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan***”.

Fungsi :

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 98 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- 1) ***Sekretariat***, dengan tugas “Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol”.
- 2) ***Bidang Pembangunan Sumber daya Industri***, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri”.

- 3) ***Bidang Pemberdayaan Industri***, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan industri”.
- 4) ***Bidang Sarana Prasarana***, Pengawasan dan Pengendalian Industri, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri”.
- 5) ***Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri***, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)”.
- 6) ***Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri***, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor”.
- 7) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Surabaya***, dengan tugas “Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 8) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember***, dengan tugas “Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 9) ***UPT Industri Logam dan Perakayasaan Sidoarjo***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perakayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- 10) ***UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 11) ***UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan

desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

- 12) ***UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 13) ***UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 14) ***UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan”.
- 15) ***UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan”.
- 16) ***UPT Perlindungan Konsumen Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya”.
- 17) ***UPT Perlindungan Konsumen Malang***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang”.
- 18) ***UPT Perlindungan Konsumen Jember***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember”.
- 19) ***UPT Perlindungan Konsumen Kediri***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri”.

20) ***UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro”.

C. ISU STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri dan perdagangan. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 5,33 persen (c-to-c), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.403,17 triliun. Struktur perekonomian Jawa Timur menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 31,32 persen, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 18,55 persen. Hal ini menegaskan bahwa sektor industri dan perdagangan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kinerja perdagangan luar negeri menunjukkan tren positif. Nilai ekspor Jawa Timur Januari–Desember 2025 mencapai US\$30,40 miliar atau meningkat sebesar 16,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan dominasi ekspor nonmigas dari sektor industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan potensi besar penguatan hilirisasi dan peningkatan daya saing produk industri Jawa Timur di pasar global. Namun demikian, dinamika perekonomian global, persaingan usaha yang semakin ketat, serta tuntutan transformasi digital dan industri hijau menuntut penguatan kebijakan dan strategi pembangunan sektor industri dan perdagangan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran kondisi tersebut, beberapa permasalahan strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas industri pengolahan, khususnya pada industri kecil dan menengah, baik dari aspek teknologi, efisiensi produksi, maupun pemenuhan standar mutu dan sertifikasi.
- b. Terbatasnya integrasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rantai pasok industri besar dan pasar ekspor, sehingga kontribusi nilai tambah yang dihasilkan belum maksimal.

- c. Ketergantungan terhadap pasar ekspor dan komoditas tertentu yang berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global.
- d. Tantangan dalam menjaga stabilitas dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri, khususnya dalam rangka pengendalian inflasi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- e. Tuntutan transformasi menuju industri hijau dan digitalisasi perdagangan yang memerlukan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan dukungan kebijakan yang adaptif.

Pembangunan sektor industri dan perdagangan daerah tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan dokumen perencanaan daerah. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan, termasuk industri pengolahan dan perdagangan. Sejalan dengan kebijakan nasional, isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah meliputi:

- a. Penguatan hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.
- b. Peningkatan ekspor nonmigas dan diversifikasi pasar ekspor.
- c. Penguatan ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta UMKM.
- d. Penguatan sistem logistik dan distribusi perdagangan dalam negeri.
- e. Transformasi menuju industri hijau dan digitalisasi perdagangan.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar pembangunan sektor industri dan perdagangan berjalan selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan analisis kondisi makro ekonomi daerah berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka perumusan isu strategis dilakukan melalui identifikasi permasalahan pembangunan sektor industri dan perdagangan serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025–2029 menetapkan tujuan peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor industri dan perdagangan, dengan sasaran strategis antara lain peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan kinerja perdagangan luar negeri, peningkatan stabilitas perdagangan dalam negeri, serta peningkatan daya saing Industri Kecil

dan Menengah (IKM). Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD, sektor industri dan perdagangan diarahkan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan kondisi ekonomi Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Jawa Timur, serta mempertimbangkan dinamika perdagangan global dan tantangan transformasi industri, maka isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pertumbuhan dan daya saing industri pengolahan sebagai sektor dominan penyumbang PDRB Jawa Timur.
- b. Peningkatan nilai ekspor nonmigas melalui hilirisasi industri dan diversifikasi pasar.
- c. Penguatan stabilitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri guna mendukung pengendalian inflasi dan kelancaran distribusi barang.
- d. Peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah melalui inovasi, standardisasi, sertifikasi, dan digitalisasi.
- e. Pengembangan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi landasan dalam penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

D. CASCADING KINERJA

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Visi pembangunan Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah “***Bersama Jawa Timur yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045***”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) misi pendukung capaian, yaitu :

1. ***Jatim Sejahtera*** : Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan;

2. **Jatim Kerja** : Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas;
3. **Jatim Akses** : Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan;
4. **Jatim Agro** : Meningkatkan kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan;
5. **Jatim Cerdas** : Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
6. **Jatim Sehat** : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan;
7. **Jatim Berkah Amanah** : Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif;
8. **Jatim Harmoni** : Menjaga terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif;
9. **Jatim Lestari** : Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memegang peran sentral dan strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur yang inklusif. Melalui fungsi koordinasi dan eksekusi program di sektor industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur fokus pada penguatan struktur industri pengolahan dan perluasan jaringan pasar yang diterjemahkan ke dalam dukungan penuh terhadap dua misi utama Nawa Bhakti Satya, yaitu:

1. Dukungan Terhadap Misi: **Jatim Sejahtera**
Misi ini berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengimplementasikannya melalui dua program unggulan:
 - a. **Desa Devisa**: Melakukan verifikasi usulan dari Bea Cukai, DPMD, dan pelaku usaha untuk pendampingan ekspor oleh LPEI.
 - b. **Peti Koin Bermantra**: Memberikan fasilitasi pelatihan, standardisasi, dan pemasaran bagi kelompok masyarakat miskin produktif di desil 1 dan 2.
2. Dukungan Terhadap Misi: **Jatim Kerja**

Misi ini bertujuan memperluas lapangan kerja berkualitas melalui penguatan kewirausahaan dan stabilitas ekonomi. Dukungan nyata yang diberikan meliputi:

- a. **Stabilisasi Harga:** Melakukan pemantauan harga bahan pokok di 121 pasar melalui aplikasi SISKAPERBAPO serta menyelenggarakan pasar murah.
- b. **Ekosistem Halal:** Memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi produk dan penyelia halal di 38 Kabupaten/Kota.
- c. **Promosi Dagang dan Investasi:** Memperluas jaringan pasar melalui misi dagang dan promosi dengan target fasilitasi 50 pelaku usaha per tahun.
- d. **Millenial Job Center (MJC):** Menyiapkan mentor profesional khususnya di bidang industri digital untuk membimbing talenta muda.

Guna memastikan visi dan misi pembangunan Jawa Timur dapat terwujud secara sistematis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kerangka kerja strategis yang terukur. Implementasi dari strategi tersebut dibagi ke dalam urusan bidang perindustrian, perdagangan, serta unsur penunjang pemerintahan sebagai berikut:

Sasaran 1 (Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian), sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. (1) Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): *“Nilai PDRB Industri Pengolahan”*

Sasaran 2 (Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan), sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. (2) Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): *“Nilai PDRB Perdagangan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor”*

Penunjang Urusan Pemerintahan :

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran strategis:

1. (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Kinerja Utama (IKU): *“Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”*.



Gambar 1.2 Cascading Kinerja Tahun 2025

Selanjutnya, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh 20 (dua puluh) unit kerja yang terbagi menjadi 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang dan 14 (empat belas) UPT yang tersebar di beberapa Kab./Kota dengan wilayah kerja yang meliputi 38 (tiga puluh delapan) Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Timur.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur secara aktif melakukan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi kinerja dan permasalahan yang diidentifikasi pada periode sebelumnya. Fokus utama tindak lanjut dilakukan pada bidang-bidang strategis sebagai berikut:

1. Urusan Bidang Perindustrian

- **Pendaftaran SIINas:** Menanggapi kendala pelaku usaha yang belum memahami tata cara registrasi SIINas, Disperindag telah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kab/Kota serta mengintensifkan sosialisasi manfaat SIINas. Hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah industri yang terdaftar mencapai 14.196 perusahaan (tumbuh 23,53%) pada tahun berjalan.
- **Penyediaan Data Industri:** Mengatasi kendala keterlambatan data primer dari Kabupaten/Kota, dinas melakukan sinkronisasi data industri melalui survei lapangan dan pengolahan data sekunder yang lebih sistematis untuk menjamin akurasi perencanaan.

2. Urusan Bidang Perdagangan

- **Peningkatan Perizinan:** Menindaklanjuti tingginya permohonan izin (mencapai 152.384 dokumen), dinas melakukan pendampingan dan pembinaan intensif agar pelaku usaha memahami kewajiban administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Misi Dagang dan Promosi:** Menanggapi hambatan biaya logistik antar pulau dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri, Disperindag melaksanakan 12 kali Misi Dagang Provinsi mitra dengan nilai transaksi mencapai Rp 16,31 triliun. Rekomendasi DPRD ditindaklanjuti dengan memperluas jejaring pasar nasional dan internasional untuk memperkuat daya saing produk Jawa Timur terhadap produk impor.
- **Stabilitas Harga (SISKAPERBAPO):** Mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok, dinas melakukan pemantauan harga secara real-time di 121 pasar rakyat. Tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi terkait untuk menjaga kelancaran distribusi barang.

1. Penunjang Urusan Pemerintah

- **Akuntabilitas SAKIP:** Dengan realisasi kinerja sebesar 99,35%, dinas terus melakukan penguatan pada sistem administrasi dan pelaporan kinerja. Tindak lanjut difokuskan pada sinkronisasi cascading kinerja agar setiap program penunjang berdampak langsung pada pencapaian indikator utama dinas dan meningkatkan nilai akuntabilitas instansi (SAKIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN RENSTRA PERIODE BERJALAN)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi acuan utama dalam penentuan arah kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Secara ringkas, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Cascading Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	30,64 %
			Nilai PDRB industri pengolahan	950 triliun Rupiah
2		Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Rasio PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	18,50 %
			Nilai PDRB Perdagangan	550 triliun Rupiah

Mengacu pada RPJMD 2025-2029 disebutkan bahwa agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

Pada visi "**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**", misi kedua yaitu "**Jatim Kerja**" yang berfokus pada memperluas lapangan kerja berkualitas dan stabilitas ekonomi, mempunyai tujuan yang terkait secara langsung dengan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Hal ini ditetapkan dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri serta Perdagangan. Kemudian ditetapkan sasaran dari RPJMD yang menjadi dasar dari tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 2025-2029 dapat dijabarkan ke dalam urusan bidang sebagai berikut:

Sasaran 1 (Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian), sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan (*Sasaran Strategis 1*)

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Nilai PDRB Industri Pengolahan (Target Perkin 2025: 950 Triliun Rupiah)

Sasaran 2 (Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan), sasaran yang ingin dicapai adalah:

2. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan (*Sasaran Strategis 2*)

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Nilai PDRB Perdagangan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Target Perkin 2025: 550 Triliun Rupiah)

Supporting (Penunjang Urusan Pemerintahan): Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (*Sasaran Strategis 3*)

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

B. RINGKASAN RENJA PERIODE BERJALAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029.

Tabel 2.2. Ringkasan Renja tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	30,64 %
			Nilai PDRB industri pengolahan	950 triliun Rupiah
2		Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Rasio PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	18,50 %
			Nilai PDRB Perdagangan	550 triliun Rupiah

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

C. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Perjanjian Kinerja Murni tahun 2025 disusun pada awal tahun sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja tahunan (Renja). PK Murni ini menjadi instrumen awal dalam mengawal pencapaian target strategis Renstra 2025-2029 pada tahun pertama implementasinya.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Persepektif
1	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	1. Nilai PDRB industri pengolahan	614,33 Triliun Rupiah	Proses Bisnis
2	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	2. Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	415,78 Triliun Rupiah	Proses Bisnis
3	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	3. Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	1,2 %	Penerima Layanan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	90	Penguatan Internal dan Anggaran

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan II Tahun 2019-2025.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 4 (empat) sasaran strategis. Keempat sasaran strategis tersebut sebagai berikut : (1) Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan; (2) Meningkatnya PDRB sektor perdagangan; (3) Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; (4). Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna mengoperasionalkan sasaran strategis tersebut ke dalam kerja nyata tahunan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk komitmen tertulis atas target yang harus dicapai. Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

Penyesuaian dalam PK Perubahan 2025 ini dilakukan untuk menyelaraskan target indikator makro dengan dinamika ekonomi terkini. Melalui PK Perubahan ini, target sasaran strategis yang sebelumnya bersifat umum dipertajam menjadi angka nominal yang lebih terukur, yakni target Nilai PDRB Industri Pengolahan sebesar Rp950 Triliun dan Nilai PDRB Kategori Perdagangan sebesar Rp550 Triliun. Hal ini dimaksudkan agar setiap program kerja, dapat memberikan kontribusi yang lebih akurat dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi Jawa Timur.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Persepektif
1	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	1. Nilai PDRB industri pengolahan	950 triliun Rupiah	Proses Bisnis
2	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	2. Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	550 triliun Rupiah	Proses Bisnis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 diukur dengan cara :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Perkin 2025	Target Renstra 2025	Realisasi 2023	Realisasi		Capaian (%)
				2024	2025	
Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp Triliun)	950	950	830,12	910,45	1.065,87	112,20%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Perkin 2025	Target Renstra 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian (%)
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp Triliun)	550	550	480,55	520,30	631,28	114,78%

Analisa Capaian Kinerja 2025

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang

mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan dan 1 (satu) unsur penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur. Analisis capaian kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah, ditetapkan Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan. Sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Rp Triliun). Capaian kinerja beserta analisis terhadap indikator tersebut disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Tabel 3.1.1 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022-2025

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Perkin 2025	Target Renstra 2025	Realisasi				Nasional
			2022	2023	2024	2025	2025
Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	950	950	835,71	901,88	977,56	1.065,87	4.385,60

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	950	1.065,87	112,20

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Nilai PDRB Industri Pengolahan mencapai Rp1.065,87 triliun dari target sebesar Rp950 triliun, sehingga capaian kinerja mencapai 112,20%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui sebesar 12,20% dan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor Industri Pengolahan tetap

menjadi kontributor terbesar terhadap struktur PDRB Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 31,32%, serta mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,98% (c-to-c). Selain itu, sektor ini menjadi penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 1,82%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama perekonomian Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun 2025.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa subsektor industri pengolahan, antara lain industri makanan dan minuman, industri kimia, logam dasar, serta alat angkutan. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan domestik, khususnya pada momentum akhir tahun dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), penguatan ekspor produk manufaktur, serta meningkatnya investasi dan impor barang modal yang mendukung aktivitas produksi industri. Selain faktor makroekonomi, keberhasilan tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, antara lain pembangunan sumber daya industri, penguatan sarana dan prasarana industri, pengembangan hilirisasi industri, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan sehingga target kinerja Tahun 2025 dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	2022	725	835,71	115,27
		2023	750	901,88	120,25
		2024	775	901,88	126,14
		2025	950	1.065,87	112,20

Berdasarkan Tabel 3.1.3, realisasi Nilai PDRB Industri Pengolahan pada Tahun 2025 mencapai Rp1.065,87 triliun atau sebesar 112,20% dari target Rp950 triliun. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai realisasi PDRB Industri Pengolahan menunjukkan tren peningkatan. Meskipun demikian, persentase capaian terhadap target lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 karena target kinerja Tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara nominal, Nilai PDRB Industri Pengolahan meningkat dari Rp901,88 triliun pada Tahun 2024 menjadi Rp1.065,87 triliun pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tetap positif, meningkatnya volume ekspor nonmigas Jawa Timur, serta membaiknya aktivitas produksi industri pengolahan selama Tahun 2025. Selain dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, peningkatan tersebut juga didukung oleh berbagai program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan sektor industri, antara lain fasilitasi Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri, serta pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Program-program tersebut turut mendukung peningkatan kualitas data industri, penguatan daya saing industri, serta penyusunan kebijakan pembangunan industri yang lebih tepat sasaran. Pada Tahun 2025, persentase industri yang terdaftar dalam SIINas mencapai 23,53%, melampaui target sebesar 20%, sehingga mendukung tersedianya basis data industri yang semakin akurat dan komprehensif.

Tabel 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Ket. (+/-)
		Jatim	Nasional	
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun) <i>*) Nasional: PDB sektor industri pengolahan</i>	1.065,87	4.137,60	Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jatim tahun 2025 berkontribusi sebesar 25,76% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional
	Pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan</i>	5,98	5,30	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Jawa Timur di atas Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Nasional.
	Persentase kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan</i>	31,32	18,75	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan Jawa Timur terhadap total PDRB Jawa Timur lebih besar dari Kontribusi PDB sektor industri pengolahan nasional terhadap total PDB Nasional.

Berdasarkan Tabel 3.1.4, capaian sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Timur menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan capaian nasional pada

beberapa indikator. Pada Tahun 2025, Nilai PDRB Industri Pengolahan Jawa Timur mencapai Rp1.065,87 triliun atau sebesar 112,20% dari target Rp950 triliun. Nilai tersebut memberikan kontribusi sebesar 31,32% terhadap total PDRB Jawa Timur sebesar Rp3.403,17 triliun sehingga sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Timur Tahun 2025 mencapai Rp1.065,87 triliun, sedangkan Nilai PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional mencapai Rp4.137,60 triliun. Dengan demikian, sektor industri pengolahan Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 25,76% terhadap PDB sektor industri pengolahan nasional, yang menunjukkan peran strategis Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional. Selain itu, sektor industri pengolahan Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,98%, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan nasional sebesar 5,30%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan di Jawa Timur tumbuh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas produksi industri, penguatan ekspor manufaktur, serta berbagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengembangan sektor industri. Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur PDRB Jawa Timur menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor industri pengolahan nasional.

Tabel 3.1.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 1 (Rp)	Total Anggaran Belanja (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	38.006.384.464	73.537.444.494	51,68%

Tabel 3.1.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan	Rp. 950 T	Rp. 1.065,87 T	112,20%
		Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
		38.006.384.464	35.897.662.970	94,45%

Tabel 3.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Formulasi
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Trilyun)	112,20%	98,74%	83,65%	Capaian Kinerja dikurangi Capaian penyerapan anggaran

Tabel 3.1.8 Pengukuran Efisiensi Rincian Output (RO) di Tingkat Sasaran

RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x (CRO)- (RARO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	6=(5)-(4)
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	100%	17.417.320.917	17.197.891.240	17.417.320.917	219.429.677
Jumlah	100%	17.417.320.917	17.197.891.240	17.417.320.917	219.429.677

Berdasarkan Tabel 3.1.7 dan Tabel 3.1.8, pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan dukungan pemanfaatan anggaran yang efektif. Capaian kinerja sebesar 112,20% dengan tingkat efisiensi sebesar 83,65% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Hasil tersebut mencerminkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025. Program-program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri, pengembangan sumber daya industri, penguatan perizinan industri, serta pengelolaan data industri yang mendukung peningkatan nilai

tambah sektor industri pengolahan. Uraian kontribusi masing-masing program adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan tidak lepas dari dukungan Program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Uraian terkait Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mendukung pencapaian Sasaran Strategis melalui penyusunan, penerapan, dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi serta berbagai kegiatan pengembangan industri. Indikator kinerja program berupa persentase peningkatan unit usaha industri ditargetkan sebesar 1,25% dan terealisasi sebesar 1,30%, sehingga target program berhasil dilampaui. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan industri, penguatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), pembangunan sumber daya industri, serta pengembangan hilirisasi industri yang mendorong peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan. Dari sisi anggaran, program ini memperoleh alokasi sebesar Rp14.806.495.917 dengan realisasi sebesar Rp14.594.130.000 atau mencapai 98,56%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian target kinerja, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan provinsi. Indikator kinerja program berupa persentase peningkatan pengendalian izin usaha industri ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi sebesar 18,37%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan pelaksanaan pengendalian perizinan dalam mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan industri di Jawa Timur. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.590.000.000 dengan realisasi sebesar Rp2.582.900.000 atau mencapai 99,73%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dan subkegiatan terlaksana sesuai rencana serta mendukung pencapaian target program secara optimal.

- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan provinsi berbasis SIINas. Indikator kinerja program berupa persentase industri yang terdaftar dalam SIINas ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 23,53%, sehingga target program berhasil dilampaui. Jumlah industri yang terdaftar meningkat dari 11.492 unit pada Tahun 2024 menjadi 14.196 unit pada Tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan sosialisasi serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendorong registrasi dan pelaporan kegiatan industri melalui SIINas. Dari sisi anggaran, program ini memperoleh alokasi sebesar Rp20.825.000 dengan realisasi sebesar Rp20.861.240. Secara keseluruhan, pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mendukung tersedianya basis data industri yang lebih akurat sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan industri di Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2025, sasaran strategis pertama didukung dengan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan, dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan melalui 10 unit kerja sebagai berikut:

- a) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b) Bidang Pemberdayaan Industri;
- c) Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- d) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif (PMPI-TK) Surabaya;
- e) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif (PMPI-TK) Malang;
- f) UPT Industri Logam, Mesin, dan Perekayasaan Sidoarjo;
- g) UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Sidoarjo;
- h) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
- i) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan;
- j) UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya.

Berikut disajikan beberapa data kinerja pada Urusan Industri sebagai pendukung keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis :

Tabel 3.1.9 Data Perkembangan Industri di Jawa Timur

No	SKALA INDUSTRI	JUMLAH UNIT USAHA	SUMBER DATA
1.	Industri Besar	2.167	<u>Sumber :</u> Daftar SIINAS tahun 2025 dan BRS: Direktori Industri Manufaktur Provinsi Jawa Timur 2025
2.	Industri Menengah	3.679	
3.	Industri Kecil	824.731	
TOTAL		830.577	

Tabel 3.1.10 Capaian Target Tahapan Penyelesaian RPIP 2025

No	TAHAPAN RPIP	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Tersusunnya naskah akademik	30	<u>Bukti :</u> Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) <u>Nilai Akumulasi :</u> 100%
2.	Tersusunnya Draft Raperda RPIP	20	
3.	Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian	25	
4.	Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda	15	
5.	Penetapan Perda RPIP	10	

Sumber : Disperindag Prov. Jatim

Tabel 3.1.11 Fasilitas Standardisasi Produk Industri di Jawa Timur th. 2021-2025

No	FASILITASI STANDARDISASI	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Batik Mark	5	0	5	0	0
2.	HACCP	0	0	0	0	1
3.	Sertifikat Halal	39	303	170	169	130
4.	ISO 9001	0	1	0	0	5
5.	Barcode	5	5	2	2	0
6.	SPPT-SNI	3	0	0	0	3
7.	Uji Nutrisi	55	13	7	6	35
8.	Uji Produk	0	0	0	0	11
9.	Bimbingan ISO 9001	2	1	0	0	6
10.	Bimbingan Upgrading ISO 9001	0	1	0	0	0
11.	Bimbingan HACCP	0	0	0	1	1
12.	Bimbingan GKM	0	0	0	0	0
13.	Bimbingan SOP	0	0	0	0	0
14.	Jasa Desain Industri & TK	774	324	0	245	482
<i>Total Standardisasi</i>		883	648	184	423	674

No	FASILITASI STANDARDISASI	2021	2022	2023	2024	2025
No.	FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Merek	439	439	225	206	141
2.	Cipta	0	0	0	0	26
3.	Desain Industri	0	0	0	0	0
<i>Total Kekayaan Intelektual</i>		439	439	225	206	167
TOTAL FASILITASI		1.322	903	409	629	841

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

Dukungan standardisasi terhadap pelaku industri di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif yang berlokasi di Surabaya dan Malang (Tabel 3.1.11).

Adapun capaian kinerja dari 5 (lima) UPT Industri komoditi di lingkungan industri (sentra) yang tersebar di lima kota di Jawa Timur (tabel 3.1.12) diantaranya, UPT Industri Logam dan Perekayasaan, UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit, UPT Industri Kayu dan Produk Kayu serta UPT Aneka Industri dan Kerajinan

Tabel 3.1.12 Capaian Kinerja Pelayanan UPT Industri

No	UPT Industri	Lokasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Logam dan Perekayasaan	Sidoarjo	1.145	1277	3.776	1.148	1.003	1.251
2.	Makanan, Minuman dan Kemasan	Sidoarjo	2.926	1090	660	1.870	1.788	1.891
3.	Kulit dan Produk Kulit	Magetan	1.529	1488	1.745	1.820	2.544	1.562
4.	Kayu dan Produk Kayu	Pasuruan	2.118	1.612	539	561	479	371
5.	Aneka Industri dan Kerajinan	Sidoarjo	952	341	619	665	855	1.280

Sumber : Disperindag, 2025

Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian, data industri besar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan data Direktorat Industri Manufaktur Provinsi Jawa Timur, jumlah industri besar pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 2.167 industri, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebanyak 2.084 industri. Dengan demikian, laju

pertumbuhan jumlah industri besar pada Tahun 2025 sebesar 3,98%, sebagaimana perhitungan berikut.

$$= \left(\frac{(\text{Jumlah Industri Besar th. 2025} - \text{Jumlah Industri Besar th. 2024})}{\text{Jumlah Industri Besar th. 2024}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{(2.167 - 2.084)}{2.084} \right) \times 100\% = 3,98\%$$

2. SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

Untuk mendukung pencapaian tujuan kedua, yaitu meningkatnya nilai tambah penyelenggaraan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menetapkan Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp Triliun). Capaian target kinerja atas sasaran strategis tersebut beserta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022-2025

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Perkin 2025	Target Renstra 2025	Realisasi				Nasional
			2022	2023	2024	2025	2025
Nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	550	550	509,94	558,64	596,09	631,28	2.854,18

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
-------------------	-------------------------------	-------------	----------------	---------

Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	550	631.28	114,78%
--------------------------------------	---	-----	---------------	----------------

Berdasarkan Tabel 3.2.2, capaian Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan pada Tahun 2025 mencapai 114,78% dengan realisasi sebesar Rp631,28 triliun dari target sebesar Rp550 triliun. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 18,55% terhadap total PDRB Jawa Timur Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan tetap tumbuh positif serta berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian Provinsi Jawa Timur.

- Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, melalui pemantauan harga secara berkala di 38 kabupaten/kota serta pelaksanaan 303 kali Pasar Murah pada berbagai wilayah di Jawa Timur guna menjaga stabilitas harga, keterjangkauan, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan saat terjadi gejolak harga komoditas strategis.
- Penguatan perdagangan luar negeri yang ditunjukkan dengan nilai ekspor Jawa Timur Tahun 2025 mencapai US\$30,40 miliar atau meningkat 16,61% dibandingkan Tahun 2024, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Penguatan Perdagangan Dalam Negeri, melalui pelaksanaan 12 kali Misi Dagang yang menghasilkan komitmen transaksi sebesar Rp16,31 triliun, sehingga memperluas jejaring perdagangan antardaerah serta meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha Jawa Timur.
- Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan yang meliputi pengelolaan perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengembangan ekspor, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Sinergi pelaksanaan program tersebut mendukung peningkatan aktivitas perdagangan serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja sektor perdagangan pada Tahun 2025.

Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	2022	450	509,94	115,27
		2023	450	558,64	120,25
		2024	376,02	596,09	158,53
		2025	550	631,28	114,78

Berdasarkan Tabel 3.2.3, realisasi Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2025, realisasi mencapai Rp631,28 triliun atau sebesar 114,78% dari target sebesar Rp550 triliun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan tetap tumbuh positif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Kinerja tersebut didukung oleh berbagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok melalui pemantauan harga di 38 kabupaten/kota serta pelaksanaan pasar murah. Selain itu, penguatan perdagangan dalam negeri melalui pelaksanaan Misi Dagang, peningkatan kinerja ekspor, pengembangan sarana distribusi perdagangan, serta implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) turut berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan dan pencapaian target kinerja sektor perdagangan pada Tahun 2025.

Tabel 3.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra (2025)	Realisasi 2025	Capaian (%)
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	550	631,28	114,78

Berdasarkan Tabel 3.2.4, capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025 mencapai 114,78%. Realisasi sebesar Rp631,28 triliun telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp550 triliun, sehingga target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2025 berhasil tercapai.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan sektor perdagangan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, pengembangan sarana distribusi perdagangan, penguatan perdagangan dalam negeri melalui Misi Dagang, peningkatan kinerja ekspor, serta implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja sektor perdagangan.

Tabel 3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Ket. (+/-)
		Jatim	Nasional	
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor	631,28	2.854,18	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor Jatim tahun 2025 berkontribusi sebesar 22,12% terhadap PDB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor nasional.
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	3,99	4,86	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

	Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor - *) Nas.: PDB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor			Mobil dan Sepeda Motor Jawa Timur sedikit di bawah Laju pertumbuhan sektor Perdagangan Nasional.
	Persentase kontribusi sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB *) Nas.: PDB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor	18,55	12,94	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor Jawa Timur terhadap total PDRB Jawa Timur lebih besar dari Kontribusi PDB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor nasional terhadap total PDB.terhadap total PDB.

Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2025 sebesar 18,55% atau senilai Rp631,28 triliun dari total PDRB Provinsi Jawa Timur. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp550 triliun, sehingga capaian kinerjanya mencapai 114,78%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Jawa Timur Tahun 2025 mencapai Rp631,28 triliun dan memberikan kontribusi sebesar 22,12% terhadap PDB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai Rp2.854,18 triliun. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu kontributor utama terhadap sektor perdagangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Jawa Timur Tahun 2025 tercatat sebesar 3,99%, sedikit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan nasional sebesar 4,86%. Meskipun demikian, sektor perdagangan tetap memberikan kontribusi sebesar 18,55% terhadap struktur PDRB Jawa Timur dan berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Tabel 3.2.6 Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 2 (Rp)	Total Anggaran Belanja Langsung (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	135.239.520.909	135.239.520.909	91,89

Tabel 3.2.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor	Rp. 550,00 T	Rp. 631,28 T.	114,78 %
		Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		31.542.850.000	30.817.364.450	97,70%

Tabel 3.2.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Formulasi
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mobil dan Sepeda Motor (Rp. Trilyun)	114,78 %	97,77 %	17,01%	Capaian Kinerja dikurangi Capaian penyerapan anggaran

Berdasarkan Tabel 3.2.8, pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan dukungan pemanfaatan anggaran yang efektif. Pada Tahun 2025, capaian kinerja mencapai 114,78% dengan tingkat efisiensi sebesar 17,01%, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilaksanakan secara efektif melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun 2025. Program-program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan, penguatan distribusi barang, pengembangan ekspor, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Uraian kontribusi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran dan Perizinan Perusahaan dilaksanakan melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), penerbitan izin perdagangan bahan berbahaya, serta penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API). Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp589.360.605 dengan realisasi sebesar Rp585.778.049 atau mencapai 99,39%. Indikator program berupa jumlah izin yang diterbitkan ditargetkan sebanyak 135.000 dokumen dan terealisasi sebanyak 152.384 dokumen atau mencapai 112,88%. Capaian tersebut didukung oleh penerbitan 116 dokumen rekomendasi perizinan serta 152.268 dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), sehingga program mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional, pusat distribusi provinsi, serta pasar lelang komoditas. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp748.667.626 dengan realisasi sebesar Rp718.535.671

atau mencapai 95,98%. Indikator program berupa pertumbuhan sarana distribusi perdagangan ditargetkan sebesar 1,00% dan terealisasi sebesar 1,00%. Pengelolaan Pusat Distribusi Jawa Timur (Puspa Agro) melalui PT JGU terus dioptimalkan melalui koordinasi dan penguatan fungsi distribusi logistik sehingga mendukung kelancaran distribusi barang di Jawa Timur.

- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp14.802.433.000 dengan realisasi sebesar Rp14.398.718.579 atau mencapai 97,27%. Indikator program berupa tingkat inflasi bahan makanan ditargetkan sebesar 3%, sedangkan realisasi mencapai 4,19%, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas strategis, antara lain beras, cabai rawit, dan daging ayam ras. Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemantauan harga, operasi pasar, pasar murah, serta koordinasi dengan Satgas Pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- 4) Program Pengembangan Ekspor memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp8.245.500.000 dengan realisasi sebesar Rp8.041.564.015 atau mencapai 97,53%. Indikator program berupa pertumbuhan nilai ekspor nonmigas ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi sebesar 18,17% dengan nilai ekspor mencapai US\$29,77 miliar. Capaian tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar US\$5,00 miliar serta pelaksanaan misi dagang dan pameran yang memfasilitasi 892 pelaku usaha sehingga memperkuat daya saing produk Jawa Timur di pasar internasional.
- 5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp7.025.860.000 dengan realisasi sebesar Rp6.992.135.872 atau mencapai 99,52%. Indikator program berupa jumlah pelaku usaha yang difasilitasi ditargetkan sebanyak 100 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 892 pelaku usaha. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan 12 kali misi dagang antardaerah, pameran dagang, serta sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp16,31 triliun, merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, sehingga berkontribusi terhadap perluasan akses pasar produk lokal Jawa Timur.

3. SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 3 berperan sebagai sasaran pendukung dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sasaran strategis ini diukur menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian target kinerja beserta analisisnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Sasaran Starategis 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Perkin 2025	Target Renstra 2025	Realisasi				Nasional
			2022	2023	2024	2025	2025
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90	93,60	90,70	93,52	93,67	95,02	-

Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90	95,02	105,58%

Berdasarkan Tabel 3.3.2, capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 mencapai 105,58% dengan realisasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 95,02 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja Tahun 2025 berhasil dilampaui. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang lebih terukur, penguatan sistem pengukuran kinerja, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, hingga optimalisasi evaluasi internal secara berkala. Berbagai upaya

tersebut mendorong peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90,70	93,52	93,57	95,02

Berdasarkan Tabel 3.3.3, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah selama periode Tahun 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 90,70 pada Tahun 2022 menjadi 95,02 pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah hingga mencapai kategori Sangat Memuaskan. Peningkatan capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya penyempurnaan tata kelola kinerja, antara lain penyelarasan Pohon Kinerja dengan sasaran pembangunan daerah, penguatan keterkaitan Proses Bisnis antarbidang, pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis digital, peningkatan kualitas Standar Pelayanan, serta optimalisasi evaluasi internal secara berkelanjutan. Meskipun demikian, penyempurnaan akuntabilitas kinerja tetap perlu dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra (2025)	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	93,60	95,02	105,58%

Berdasarkan tabel di atas tercatat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah jika dibandingkan dengan target pada Renstra (2025-2029) hasilnya adalah tercapai sebesar 105,58%. Faktor pendorong capaian tersebut adalah hasil dari analisa sebelum menetapkan target pada dokumen Renstra yang mana dalam penetapan baik indikator maupun target Perangkat Daerah selalu mendapatkan pendampingan dari beberapa pihak yang terkait seperti Bappeda Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang intensif dalam penyusunan perencanaan strategis mampu menghasilkan target yang menantang namun tetap realistis untuk dicapai. Realisasi sebesar 95,02 yang melampaui target Renstra sebesar 93,60 mencerminkan efektivitas sistem manajemen kinerja yang diterapkan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun berjalan.

Tabel 3.3.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Sasaran Strategis 3 (Rp)	Total Anggaran Belanja (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	99.624.519.532	93.730.968.289	94,08%%

Berdasarkan tabel di atas tercatat bahwa capaian pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah selama kurun 2022 – 2025 cenderung mengalami kenaikan yang konsisten, yakni dari 90,70 pada tahun 2022 menjadi 95,02 pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan secara berkesinambungan terkait akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra (2025-2029) sebesar 93,60, maka hasilnya adalah

tercapai sebesar 105,58%. Faktor pendorong capaian tersebut adalah hasil dari analisa sebelum menetapkan target pada dokumen Renstra yang mana dalam penetapan baik indikator maupun target Perangkat Daerah selalu mendapatkan pendampingan dari pihak terkait seperti Bappeda Provinsi Jawa Timur. Capaian pada Tahun 2025 ini juga tidak lepas dari beberapa catatan penting yang perlu ditingkatkan mengingat tuntutan berkinerja secara akuntabel juga semakin tinggi. Beberapa hal substansi yang telah dan sedang dilakukan meliputi penyempurnaan Pohon Kinerja, Proses Bisnis, SOP, dan Standar Pelayanan. Keberhasilan mencapai nilai SAKIP 95,02 dengan serapan anggaran 94,08% menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat baik dalam menghasilkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Tabel 3.3.6 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90,00	95,02	105,58%
		Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
		99.624.519.532	93.730.968.289	94,08%%

Analisis Perbandingan (Daya Ungkit & Efisiensi):

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat ditarik beberapa poin analisis penting untuk laporan Anda:

1) Efisiensi Anggaran yang Tinggi

Tercatat bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 94,08% (tidak habis seluruhnya), Dinas mampu menghasilkan capaian kinerja (SAKIP) sebesar 105,58% (melampaui target). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 11,5% antara serapan anggaran dengan output kinerja yang dihasilkan.

2) Kualitas Belanja (Spending Better):

Realisasi anggaran sebesar Rp 93,73 Miliar telah digunakan secara efektif untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan. Hal ini terbukti dengan lompatan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya hingga mencapai angka 95,02 (Kategori

AA/Sangat Memuaskan). Anggaran tersebut tidak hanya terserap secara kuantitas, tetapi memberikan dampak kualitas pada perbaikan manajemen kinerja.

3) Korelasi Positif:

Terdapat korelasi positif antara dukungan anggaran operasional (Program Penunjang) terhadap akuntabilitas instansi. Penggunaan anggaran untuk penyempurnaan Pohon Kinerja, Proses Bisnis, dan SOP berbasis digital menjadi faktor pendorong utama sehingga realisasi kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan dalam Perkin maupun Renstra.

4) Kesimpulan Efisiensi:

Secara keseluruhan, sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" telah mencapai tingkat efisiensi yang sangat baik. Perangkat daerah berhasil mengoptimalkan sisa anggaran (efisiensi belanja) tanpa mengurangi kualitas capaian target kinerja operasional maupun strategis.

Tabel 3.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Formulasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	105,58%	94,08%%	11,50%	Capaian Kinerja dikurangi Capaian penyerapan anggaran

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencatatkan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 11,50%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang ada dan serapan sebesar 94,08%, perangkat daerah mampu memberikan kontribusi kinerja (105,58%) yang melampaui target.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang:

Capaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan total pagu sebesar Rp 99.624.519.532,- dan realisasi sebesar Rp 93.730.968.289,53 (94,08%). Program ini memiliki 3 indikator utama dengan hasil sebagai berikut:

- Nilai SAKIP : Realisasi 95,02 dari target 90 (Tercapai 105,58%).

- Persentase Realisasi Anggaran : Realisasi 94,08% dari target 90% (Tercapai 104,53%).
- Indeks Profesionalitas (IP) ASN: Realisasi 87,67 dari target 89,00 (Tercapai 98,51%).

Analisis Kendala dan Upaya Perbaikan (IP ASN):

Menunjukkan bahwa program terdiri dari 3 indikator utama, yakni nilai SAKIP dengan target 90,00 yang terealisasi sebesar 95,02; persentase realisasi anggaran dengan target 90,00% yang terealisasi sebesar 94,08%; dan indeks profesionalitas ASN dengan target 89,00 yang terealisasi 87,67. Kendala terjadi pada indikator indeks profesionalitas ASN akibat belum semua ASN melakukan update data terkait pengembangan kapasitas (diklat, seminar, pelatihan, dsb) secara mandiri ke dalam sistem kepegawaian. Sebagai upaya perbaikan pada tahun 2025, Disperindag melakukan Bimbingan Teknis kesekretariatan, peningkatan kapasitas SDM melalui diklat teknis, dan koordinasi intensif untuk mendorong peningkatan IP ASN agar bisa tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Perlu dicatat bahwa IP ASN sebesar 87,67 merupakan data sementara yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan saat BKD merilis data final nantinya, IP ASN Disperindag bisa meningkat dan mencapai target sehingga seluruh indikator program di tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Sumber Pendanaan APBN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 memiliki total anggaran sebesar Rp 146.750.941.655,- yang bersumber pada pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur. Penggunaan anggaran tersebut terdiri dari belanja program pembangunan sebesar Rp 27.833.685.935,- dan belanja rutin sebesar Rp 118.917.255.720,-. Belanja pembangunan sesuai urusan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Urusan Perindustrian sebesar Rp 5.240.500.000,- dan Urusan Perdagangan sebesar Rp22.593.185.935,-. Capaian realisasi atas penggunaan sumber daya anggaran berdasarkan belanja pembangunan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URUSAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PROGRAM
--------	-----------	----------------	---	---------

Penunjang Urusan Pemerintahan	99.624.519.532	93.730.968.289	94,08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Urusan Perdagangan	589.360.605	585.778.049	99,39	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	426.326.900	422.284.130	99,05	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	11.106.225.800	10.860.374.703	97,79	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	2.157.569.807	2.082.835.594	96,54	Program Pengembangan Ekspor
	8.311.702.823	8.284.975.044	99,68	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	8.266.759.400	8.224.996.006	99,49	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Urusan Perindustrian	17.417.320.917	17.197.891.240	98,74	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	20.000.000	19.321.400	96,61	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	53.580.000,	53.171.330	99,24	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2. Sumber Pendanaan non-APBN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui jalur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Tugas Pembantuan (TP), dan Dana Dekonsentrasi. Rincian alokasi dan realisasi pendanaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Bidang Perdagangan): Dialokasikan sebesar Rp6.400.000.000,- untuk kegiatan Sarana Perdagangan Mutu (penyediaan peralatan uji dan sarana pendukung). Hingga Triwulan IV, realisasi keuangan mencapai Rp6.390.270.000,- (99,85%) dengan capaian fisik 100%.

- b) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan: Melalui DIPA Nomor SP DIPA-090.02.4.691121/2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp283.333.000,- untuk Program Perdagangan Dalam Negeri yang difokuskan pada kegiatan pengembangan perdagangan daerah.
- c) Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perindustrian: Berdasarkan laporan konsolidasi, dialokasikan anggaran untuk dua program utama:
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri: Sebesar Rp477.444.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp427.651.000,- (100% dari target).
 - Program Dukungan Manajemen: Sebesar Rp49.793.000,- untuk pengelolaan manajemen kesekretariatan IKM yang telah terealisasi sepenuhnya (100%).

Secara total, realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat optimal, terutama pada sektor DAK Fisik yang hampir mencapai 100%. Tingginya serapan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan telah berjalan sesuai jadwal dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait, guna mendukung penguatan sarana perdagangan dan daya saing industri di Jawa Timur.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

KODE SATKER (URUSAN)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	%
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN [019] (TUGAS PEMBANTUAN)	527.237.000	477.444.000	90,56	49.793.000	9,44
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	477.444.000	427.651.000	89,57	49.793.000	10,43
- Program Dukungan Manajemen	49.793.000	49.793.000	100,00	0	0,00
KEMENTERIAN PERDAGANGAN [090] (TUGAS PEMBANTUAN)	283.333.000	283.333.000	100,00	0	0,00
- Program Perdagangan Dalam Negeri	283.333.000	283.333.000	100,00	0	0,00

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK (BIDANG PERDAGANGAN)	6.400.000.000	6.390.270.000	99,85	9.730.000	0,15
- Kegiatan Sarana Perdagangan Mutu	6.400.000.000	6.390.270.000	99,85	9.730.000	0,15
TOTAL	7.210.570.000	7.151.047.000	99,17	59.523.000	0,83

Berdasarkan data di atas, realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN secara total terserap sebesar 99,17%. Capaian ini dikategorikan Sangat Maksimal dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan kondisi tahun lalu, pada tahun 2025 tidak terdapat kendala blokir anggaran (Automatic Adjustment) yang signifikan, sehingga unit kerja dapat mengeksekusi program secara optimal sejak awal tahun. Rincian capaian adalah sebagai berikut:

Sektor Perindustrian: Mencatatkan sisa anggaran sebesar 9,44% (Rp49.793.000). Hal ini bukan disebabkan oleh kegagalan penyerapan, melainkan merupakan hasil dari efisiensi belanja pada komponen pendukung manajemen (seperti penghematan biaya perjalanan dinas dan konsumsi rapat) tanpa mengurangi volume output kinerja yang dihasilkan.

Sektor Perdagangan: Baik pada Dana Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, penyerapan mencapai angka mendekati sempurna (100% dan 99,85%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengadaan sarana perdagangan mutu telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan tepat waktu.

Dengan realisasi keuangan yang mencapai 99,17% dan realisasi fisik yang mencapai 100%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran APBN tahun 2025 telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung target kinerja instansi.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian sasaran strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga berkontribusi dalam pencapaian Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada Program Desa Devisa telah dilakukan fasilitasi promosi dan pengembangan ekspor dengan capaian kinerja sebesar 72 dari target 6. Pada Program Stabilisasi Harga telah dilakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di 121 titik pasar melalui aplikasi SISKAPERBAPO serta

pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 303 kali dengan capaian kinerja mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, Program Millenial Job Center mencapai kinerja 26 dari target 26, Program Ekosistem Halal mencapai kinerja 160 dari target 200, serta Program Promosi Dagang dan Investasi mencapai kinerja 50 dari target 50. Berbagai capaian tersebut menunjukkan dukungan aktif Disperindag dalam pelaksanaan program prioritas daerah untuk meningkatkan daya saing industri dan perdagangan Jawa Timur.

1. Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 5.185.000.000,-. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 6.788.888.043,11 atau mencapai 130,93%. Keberhasilan melampaui target ini merupakan hasil dari optimalisasi layanan serta pengelolaan sumber daya daerah yang efektif.

2. Inovasi

Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efisiensi tata kelola birokrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah mendaftarkan dan mengoperasikan sejumlah inovasi unggulan pada tahun 2025 sebagai berikut:

- SI-START (Sistem Informasi Standardisasi dan Start-Up Kreatif): Memfasilitasi IKM dalam akses standardisasi dan pengembangan startup.
- SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok): Menyajikan data real-time harga bahan pokok sebagai dasar pengambilan kebijakan stabilitas harga.
- GIIS (*Geographical Industry Information System*): Pemetaan industri berbasis geografis untuk memudahkan pemantauan persebaran sektor industri.
- SI-PANDA (Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas): Inovasi tata kelola administrasi digital untuk mempercepat alur penomoran dan pengarsipan naskah dinas secara akurat.

3. Penghargaan

Prestasi dan dedikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur diakui secara luas melalui berbagai penghargaan tingkat Nasional yang diterima sepanjang tahun 2025, antara lain:

- Anugerah Adinata Syariah 2025: Meraih Juara III Kategori Industri Halal dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) atas kontribusi memperkuat ekosistem ekonomi syariah.
- Penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Perlindungan Konsumen: Apresiasi dari Kementerian Perdagangan atas komitmen tinggi dalam pengawasan pasar dan perlindungan hak-hak konsumen di Jawa Timur.
- UB Halal Award: Penghargaan atas peran aktif dinas dalam memfasilitasi sertifikasi halal dan pengembangan produk industri halal bagi para pelaku IKM.
- Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK): Penghargaan tingkat nasional atas keberhasilan instansi dalam menerapkan standar mutu dan penilaian kesesuaian yang transparan dan akuntabel.

Raihan berbagai penghargaan di atas menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tidak hanya fokus pada pencapaian target administratif dan penyerapan anggaran, namun juga mampu menghadirkan dampak nyata (outcome) yang diakui secara nasional. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing industri di masa mendatang.

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Informasi capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan melalui penyesuaian strategi, aktivitas, dan kebijakan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih efektif dan adaptif.

BAB IV

PENUTUP

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur adalah meningkatkan daya saing industri manufaktur dan peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Struktur perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada tahun 2025 kedua sektor tersebut tetap menjadi kontributor utama dalam pembentukan PDRB Jawa Timur dan berperan signifikan dalam menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya bahwa sektor industri dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian Jawa Timur di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan, telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya secara optimal. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, serta menunjukkan tren kinerja yang positif dan berkelanjutan.

TUJUAN 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri mendapat predikat pada Kategori **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) indikator tujuan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yang menghasilkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori sangat baik.

(Supporting) : Mendukung dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui 1 (satu) Sasaran Strategis yang menghasilkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori **Sangat baik**.

Beberapa permasalahan sektor industri pengolahan Jawa Timur masih menghadapi masalah klasik seperti :

- a) Ketergantungan Bahan Baku: Masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor yang diperparah oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, sehingga mendorong kenaikan biaya produksi.

- b) Akses dan Teknologi: Keterbatasan sarana-prasarana, penguasaan teknologi industri, serta masih minimnya akses permodalan, perizinan, dan perluasan pasar.
- c) Standarisasi dan Mutu: Belum optimalnya penerapan standarisasi produk (SNI), sertifikasi Kekayaan Intelektual, dan sistem penjaminan mutu.
- d) Ekonomi Biaya Tinggi (*High Cost Economy*): Adanya regulasi yang kurang menguntungkan bagi industri dalam negeri, ketidakpastian hukum, serta beban pajak ekspor.
- e) Dinamika Operasional: Infrastruktur pendukung yang belum merata, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta ketidakpastian pasokan energi.
- f) Daya Saing Pasar: Margin keuntungan industri pengolahan yang relatif kecil (5%-10%) serta menurunnya permintaan pasar yang berisiko pada kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sedangkan permasalahan terkait dengan sektor perdagangan antara lain seperti :

- a) Logistik dan Konektivitas: Sistem logistik antar daerah yang belum efisien dan defisit pada sektor jasa serta migas yang menghambat pertumbuhan.
- b) Informasi Pasar: Belum optimalnya perdagangan antar daerah akibat kurangnya akses informasi pasar yang terintegrasi
- Rantai Distribusi: Masih fluktuatifnya harga produk agro akibat panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.
- c) Persaingan Produk Impor: Masihnya barang impor dan produk dumping akibat perdagangan bebas, yang diperparah dengan pola pikir konsumen yang lebih cenderung memilih produk luar negeri.
- d) Pengawasan: Masih lemahnya pengawasan produk impor serta pemanfaatan instrumen safeguard yang belum optimal.
- e) Ekspor: Masih kurangnya diversifikasi negara tujuan ekspor serta terbatasnya akses data produk ekspor bagi pelaku usaha.

Langkah-langkah strategis kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- a) Hilirisasi dan Substitusi Impor: Memacu pembangunan industri pendukung yang mengolah bahan baku lokal guna menekan impor (substitusi impor) serta menyukseskan program hilirisasi industri.
- b) Pemetaan Potensi: Melakukan pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di luar Jawa Timur sebagai alternatif penyedia bahan baku.
- c) Pembinaan IKM: Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara berkelanjutan untuk meningkatkan kelas usaha.
- d) Reformasi Regulasi: Mendorong penyelesaian hambatan daya saing seperti infrastruktur dan regulasi yang menyebabkan *High Cost Economy*.
- e) Penguatan Standarisasi: Menegakkan *law enforcement* terhadap penerapan SNI secara ketat serta memberikan insentif/apresiasi bagi perusahaan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
- f) Ekspansi Pasar Internasional: Meningkatkan koordinasi dengan Atase Perdagangan, *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC), dan KADIN untuk memperluas jaringan ekspor serta menarik investasi asing ke Jawa Timur.

 Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur,

Dr. Iwan S. Hut., M.M.
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 197702161996031002

LAMPIRAN

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Murni)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. IWAN, S. Hut., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHY KARYONO

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR


ADHY KARYONO

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. IWAN, S. Hut., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197702161996031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	1. Nilai PDRB Industri Pengolahan	614,33 Triliun Rupiah	Proses Bisnis
2	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	2. Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi	415,78 Triliun Rupiah	Proses Bisnis
3	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	3. Presentasi Peningkatan Barang yang diawasi dan Sertifikasi Barang Beredar	1,2 %	Penerima Layanan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	90	Penguatan Internal dan Anggaran

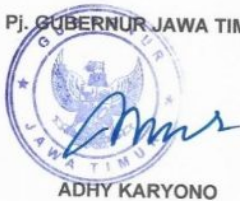
Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 504.099.000	APBD
2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 545.901.000	APBD
3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 3.000.000.000	APBD
4 Program Pengembangan Ekspor	Rp 2.650.000.000	APBD
5 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 8.885.880.175	APBD
6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 6.000.000.000	APBD
7 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 18.205.867.112	APBD
8 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 20.000.000	APBD
9 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 90.000.000	APBD
10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 96.769.980.629	APBD
Jumlah	Rp 136.671.727.916	

Surabaya, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. IWAY S. Hut, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197702161996031002

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. IWAN, S. Hut., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. IWAN, S. Hut., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197702161996031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	1. Nilai PDRB Industri Pengolahan	950 Triliun Rupiah	Proses Bisnis
2	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	2. Nilai PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	550 Triliun Rupiah	Proses Bisnis

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 589.360.605	P-APBD
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 426.326.900	P-APBD
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 11.106.225.800	P-APBD
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp 2.157.569.807	P-APBD
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 8.311.702.823	P-APBD
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 8.266.759.400	P-APBD
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 17.417.320.917	P-APBD
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 20.000.000	P-APBD
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 53.580.000	P-APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 99.624.519.532	P-APBD
Jumlah		Rp 147.973.365.784	

Surabaya, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

**KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. IWAN S. Hut. M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197702161996031002

III. Cascading Kinerja



IV. Pohon Kinerja

TUJUAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri			
INDIKATOR KINERJA	1. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
SASARAN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan			
INDIKATOR KINERJA	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
INDIKATOR KINERJA	Jumlah Pasar yang Bersertifikat SNI	Tingkat Inflasi Makanan, Minuman dan Tembakau		
KEGIATAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
INDIKATOR KINERJA	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Gudang SRG	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

TUJUAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri		
INDIKATOR KINERJA	1. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
SASARAN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		
INDIKATOR KINERJA	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
PROGRAM	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
INDIKATOR KINERJA	Ekspor Barang dan Jasa		Nilai Ekspor Non Migas
KEGIATAN	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
INDIKATOR KINERJA	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor

TUJUAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri		
INDIKATOR KINERJA	1. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
SASARAN	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		
INDIKATOR KINERJA	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
PROGRAM	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
INDIKATOR KINERJA	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan		
KEGIATAN	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KINERJA	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah barang/jasa yang diawasi

TUJUAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Perdagangan dan Peningkatan Daya Saing Industri		
INDIKATOR KINERJA	2. Rasio PDRB Industri Pengolahan		
SASARAN	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan		
INDIKATOR KINERJA	Nilai PDRB industri pengolahan		
PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	INDUSTRI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
INDIKATOR KINERJA	Persentase Pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Jumlah Izin yang terbit dengan Fasilitasi Pemenuhan komitmen persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Besar	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas
KEGIATAN	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
INDIKATOR KINERJA	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan komitmen persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Besar	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)